

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai profil atau gambaran umum dari Kabupaten Pasuruan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian ini. Hal yang dibahas dalam gambaran umum wilayah Kabupaten Pasuruan diantaranya yaitu letak wilayah dan topografi, pemerintahan hingga demografi penduduk. Sementara untuk gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan beberapa hal yang dibahas diantaranya yaitu lokasi dan keanggotaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang DLH Kabupaten Pasuruan.

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan data Statistik Daerah, Kabupaten Pasuruan berada di wilayah tapal kuda tepatnya di Provinsi Jawa Timur dengan posisi yang sangat strategis di kawasan segitiga emas sebagai poros distributor ekonomi 3 kawasan, yaitu jalur Surabaya – Jember – Banyuwangi – Bali; Surabaya – Malang; dan Malang – Jember – Banyuwangi. Secara geografis berada diantara 112⁰-30' s/d 113⁰-30' Bujur Timur dan 7⁰-30' s/d 8⁰-30' Lintang Selatan. Wilayahnya terdiri atas dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan ketinggian mulai 0 m dpl hingga lebih dari 1000 m dpl dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%.⁴⁴

⁴⁴ Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2018, Hlm. 3.

Gambar 3.1

Peta Kabupaten Pasuruan



Sumber: <https://www.pasuruankab.go.id/pages-3-peta-pasuruan.html> diakses

Kamis, 25 Juli 2019 pukul 21.10 WIB

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasuruan berbatasan langsung dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura di sebelah Utara, Kabupaten Malang dan Kota Batu di sebelah Selatan, Kabupaten Probolinggo di sebelah Timur dan Kabupaten Mojokerto di sebelah Barat.⁴⁵ Lokasinya berada di sekitar garis khatulistiwa, maka mempunyai 2 jenis perubahan iklim yaitu kemarau dan penghujan.

Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah sebesar 1.474,015 km², atau 147.401,50 Ha (3,13 persen luas Provinsi Jawa Timur). Wilayah yang memiliki ketinggian rata-rata hingga 100 mdpl (di atas permukaan laut) ada 14 kecamatan,

⁴⁵ Statistik Daerah Kabupaten Pasuruan 2018, Hlm. 1

yaitu Kejayan, Wonorejo, Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondang Wetan, Rejos, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling. Wilayah yang memiliki ketinggian rata-rata 100 hingga 500m dpl sebanyak 6 kecamatan. yaitu Purwodadi, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Sukorejo dan Pandaan. Sedang Wilayah yang mempunyai ketinggian rata-rata di atas 500 m dpl ada sebanyak 4 kecamatan, yaitu Tukur, Puspo, Tosari dan Prigen.⁴⁶ Menurut luas daerah, kecamatan yang paling luas diantaranya yaitu Kecamatan Lumbang, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Purwodadi. Masing-masing wilayahnya mempunyai luas sebesar 125,55 Km², 121,90 Km² dan 102,46 Km². Berikut ini datanya:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Daerah
1.	Purwodadi	102,46
2.	Tukur	86,30
3.	Puspo	58,35
4..	Tosari	98,00
5.	Lumbang	125,55
6.	Pasrepan	89,95
7.	Kejayan	79,15
8.	Wonorejo	47,30
9.	Purwosari	59,87

⁴⁶ Kabupaten Pasuruan dalam Angka, Hlm. 9-10.

10.	Prigen	121,90
11.	Sukorejo	58,18
12.	Pandaan	43,27
13.	Gempol	64,92
14.	Beji	39,90
15.	Bangil	44,60
16.	Rembang	42,52
17.	Kraton	50,75
18.	Pohjentrek	11,8
19.	Gondangwetan	26,25
20.	Rejoso	37,00
21.	Winongan	45,97
22.	Grati	50,78
23.	Lekok	46,57
24.	Nguling	42,60
Jumlah		1.474,02

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan

2. Demografi Penduduk

Berdasarkan kesepakatan antara BPN, BPS dan Bappeda, Kabupaten Pasuruan yang mempunyai luas wilayah sebesar 1.474,02 Km² memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1.605.307 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.809

jiwa per Km².⁴⁷ Penduduk terdiri atas 795.319 penduduk laki-laki dan 809.988 pendudukan perempuan. Angka sex ratio penduduknya sebesar 98,19. Sex ratio adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan.⁴⁸

Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk dengan mayoritas suku Jawa, kemudian berikutnya yaitu suku Madura serta masyarakat keturunan Tionghoa, Arab dan India.⁴⁹ Dilihat dari penduduk menurut kelompok umur, kelompok terbanyak ada di kelompok 15-19 yaitu sebesar 141.197 jiwa dan pada kelompok umur 20-24 sebesar 138.705 jiwa. Sedangkan kelompok umur 75 lebih, hanya sebesar 23.168 jiwa.⁵⁰

Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut jumlah penduduk bekerja pada tahun 2017 mencapai 778.563 orang mengalami penurunan sebesar 2,07% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 adalah sebesar 66,61% dimana tahun 2015 sebesar 67,79%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebesar 2,97% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 6,41%. Angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 891.322 orang, pada tahun 2015 yaitu sebanyak 815.028 orang.⁵¹

3. Kondisi Persampahan Kabupaten Pasuruan

Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya sampah merupakan

⁴⁷ Ibid., Hlm. 3.

⁴⁸ Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2018, Hlm. 101.

⁴⁹ Statistik Daerah Kabupaten Pasuruan 2018, Loc. Cit., Hlm. 1

⁵⁰ Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2018, Hlm. 102.

⁵¹ Ibid, Hlm 102

produk yang sebetulnya tidak dapat diharapkan dalam keberadaannya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat, cair, gas, dan lain sebagainya. Permasalahan sampah di Kabupaten Pasuruan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat atas perilaku masih banyaknya membuang sampah disembarang tempat. Selain itu masih sulitnya masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan demi kenyamanan lingkungan. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan. Kurangnya TPA untuk menampung kapasitas sampah yang semakin bertambah.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 adalah 1.605.307 jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 Kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari. Masalah persampahan yang timbul yang kompleks antara lain penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan.

Seiring dengan laju pembangunan, perkembangan industri di Kabupaten Pasuruan mulai mengalami pergeseran masyarakat dari desa ke kota. Masyarakat yang semakin tidak memperhatikan lingkungan sehingga terlihat kumuh di mana-mana. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan masih menggunakan sistem Open Dumping, daur ulang dan composting masih menggunakan sistem yang sederhana. Pengelolaan sampah dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengangkutan sampah dilakukan menggunakan sistem HCS (Hauled Container System) dimana saat datang ke lokasi Penampungan Sampah Sementara (TPS) lalu dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

4. Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode lima tahun kedepan sebagai visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah “MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut, disusun 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat.

Misi 2: Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan terutama pelayanan kesehatan dan permukiman.

Misi 3: Memanfaatkan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Misi 4: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Misi 5: Melakukan strategi peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Misi 6: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Misi 7: Meningkatkan kualitas pendidikan sembari menjamin terselenggaranya integrasi antara pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tersebut, maka pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan Misi ke (3) yaitu memanfaatkan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Selaras dengan Misi Bupati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merumuskan misi dengan mengacu pada visi, tugas pokok dan fungsi dinas. Pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut: “Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan; Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan”

Dengan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode tahun 2018-2023 tersebut, maka pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu komponen yang menunjang pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu dijabarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyusun.

B. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. DLH dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang menjalankan tugasnya dibantu oleh satu sekretaris dan empat kepala bidang diantaranya yaitu Bidang Tata Lingkungan; Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Limbah Non B3; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hdiup; serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut kududukan, susunan organisasi, urian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabuapaten Pasuruan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Struktur Organisasi DLH Kabupaten Pasuruan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2019.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 , ditegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu : perumus kebijakan di bidang lingkungan hidup, pelaksana kebijakan di bidang lingkungan hidup, pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pelaksana administrasi di bidang lingkungan hidup, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas Membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya pada lingkup bidang lingkungan hidup; Merumuskan visi, misi dan kebijakan teknis operasional pada lingkup Bidang Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dari sumber yang relevan; Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD dan Instansi/lembaga terkait agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan; Melaksanakan visi, misi dan kebijakan teknis operasional pada lingkup Lingkungan Hidup berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat; Melaksanakan visi, misi dan kebijakan operasional dan teknis melalui pelaksanaan program bidang lingkungan hidup. Kepala dinas juga melakukan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap semua pelaksanaan Program sekretariat dan bidang-bidang untuk mendukung tercapainya visi, misi dan kebijakan teknis operasional pada bidang lingkungan hidup; Melakukan evaluasi dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi; Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan

pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Adapun fungsinya; Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; Pengelolaan aset dan barang milik daerah atau negara; Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan. Adapun fungsinya : Pengumpulan data dan informasi sumberdaya alam; Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi pendapatan Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup; Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Pelaksanaan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Pelaksanaan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup; Penilaian terhadap dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); Pelaksanaan proses izin lingkungan; Pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaporan dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam; Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim; Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca; Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; Penetapan, perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau; Penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan makam; Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang Penglolaan Sampah, Limbah B3 dan Limbah Non B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan Limbah Non B3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai fungsi : Penyusunan informasi pengelolaan sampah; Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Pembinaan pembatasan timbunan sampah; pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk serta pendaaur ulangan sampah kepada produsen atau produksi dan masyarakat; Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; Penyediaan fasilitas pendaaurulangan sampah; Pelaksanaan kerjasama

Kabupaten atau Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; Perumusan kebijakan penanganan sampah; Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/ Tempat Pengolahan Sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R); Penyelenggaraan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); Penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir; Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah; Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; Penetapan lokasi tempat Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah; Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3), pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3

(tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis; Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis; Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis; Pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3; Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah non B3; Pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah nonB3; Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud mempunyai fungsi : Penetapan perumusan kriteria baku kerusakan lingkungan; Penentuan baku mutu lingkungan; Pelaksanaan sosialisasi kriteria baku kerusakan dan baku mutu lingkungan; Pengembangan sistem informasi peringatan akan terjadinya pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat; Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketaatan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber lain; Pelaksanaan rekomendasi pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air; Pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan air limbah aplikasi pada tanah; Pelaksanaan evaluasi ketaatan pemenuhan persyaratan teknis izin pembuangan limbah cair; Pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil uji kualitas limbah cair dan kualitas udara; Penetapan kebijakan perumusan rencana pemantauan lingkungan; Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan; Pelaksanaan pemantauan sumber-sumber pencemar; Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah; Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; Penetapan kebijakan perumusan penanggulangan sumber-sumber pencemaran; Pelaksanaan penanggulangan sumber-sumber pencemar (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian); Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar; Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber-sumber pencemar; Penetapan kebijakan perumusan rencana pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi); Pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap sumber-sumber pencemar dan pihak terkait; Pemberian informasi kepada sumber-sumber pencemar dan pihak terkait rencana pemulihan pencemaran lingkungan; Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; Pelaksanaan koordinasi perijinan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; Pelaksanaan koordinasi pemantauan

kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan sosialisasi kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan; Pelaksanaan evaluasi hasil pemulihan pencemaran lingkungan; Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pencemaran lingkungan; Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait hasil pemulihan pencemaran lingkungan; dan Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud mempunyai fungsi yaitu : Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; Pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengendalian maupun melalui pengendalian; Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin;

Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan; Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup; Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup; Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup; Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup; Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; Pemberian dukungan program penghargaan tingkat provinsi dan nasional; Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7) UPTD Laboratorium Lingkungan

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup merupakan laboratorium pengujian yang kompeten untuk menguji kualitas air limbah, air sungai, dan air bersih. UPTD Laboratorium Lingkungan berdiri pada 14 September 2011 dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 dan Perda Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Laboratorium yang menjadi payung hukum untuk menjadi laboratorium komersil yang dapat berkontribusi pada PAD Kabupaten Pasuruan. Pada 18 April 2013 UPTD Laboratorium DLH telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan sertifikat terakreditasi LP-715-ID, sampai sekarang parameter yang terakreditasi mencapai 21 parameter.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas : Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD; Menyiapkan bahanpelaksanaan kegiatan pengujian parameter air, tanah dan udara; Menyiapkan bahanpelaksanaan kegiatan pengambilan sampel atau contoh uji air, tanah dan udara; Menyiapkan bahanpelaksanaan penyelenggaraan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium lingkungan; Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, tanah dan udara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah; Menyiapkan bahanpelaksanaan pengembangan laboratorium; Menyiapkan bahanpelaksanaan pengembangan metode pengujian; Menyiapkan bahanpelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan laboratorium lingkungan; Menyiapkan

bahan pelaksanaan administrasi umum meliputi program tata usaha keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; Menyiapkan bahanpelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium; Menyiapkan bahanpelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Kelompok jabatan fungsional sampai tahun 2018 ini masih ada 1 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang semestinya jumlah ideal kelompok jabatan fungsional di Kabupaten Pasuruan sesuai luas wilayah dan potensi industri seharusnya minimal ada 12 orang PPLH dengan tugas dan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

b. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 akan dilakukan melalui 12 program dan 46 kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, Penyediaan Jasa Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yaitu Pengadaan Peralatan Kantor, Pemeliharaan R/B Gedung Kantor, Pemeliharaan R/B Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan R/B Peralatan Kantor.
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yaitu Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Operasional Laboratorium Lingkungan, Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan, Pemulihan Pencemaran Air, Pengelolaan dan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Lingkungan Hidup, Pembinaan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Hidup, Pengelolaan Limbah Non B3, Penanggulangan Pencemaran Air, Pembinaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup

- 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu Penataan RTH, Pemeliharaan RTH, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RTH.
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu Hari Lingkungan Hidup.
- 9) Program Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup yaitu Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan KLHS Kabupaten Pasuruan, Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT), Penyusunan IKLPHD Kabupaten Pasuruan, Pembinaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, Koordinasi Penilaian Amdal.
- 10) Program Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yaitu Penegakan Hukum Lingkungan, Mediasi Sengketa Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
- 11) Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yaitu Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
- 12) Program Adiwiyata yaitu Pemberdayaan Kader Lingkungan.
- 13) Program Pembinaan Lingkungan Sosial yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Industri.

Program yang akan peneliti kaji termasuk ke dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yaitu Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan, Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang mana program tersebut mengarah pada program atau kegiatan Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB). . Tujuan program SDSB untuk menjadikan lingkungan yang bersih, serta memberdayakan masyarakat untuk lebih peduli lingkungan dengan danya sampah yang dapat dikelola menjadi hal yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan tumpukan sampah. Peran SDSB di Kabupaten Pasuruan juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan Adipura yang sudah didapatkan selama 3 tahun berturut-turut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus menggalakkan program tersebut agar bisa berkembang di tiap-tiap desa yang belum tersentuh sosialisasi secara inten. Program SDSB yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan sudah rintis sejak tahun 2015 silam, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 3 Tahun 2010,⁵² lalu ditegaskan dalam Surat Himbauan Dinas Lingkungan Hidup No 660/816/424/178/2015 tanggal 21 Mei. Permasalahan sampah memang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Namun, harus melibatkan semua masyarakat, pegiat lingkungan, serta forum komunitas peduli sampah. Yang berperan dalam Program SDSB ini adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan masyarakat desa Kabupaten pasuruan serta pihak swasta (pengepul sampah) dalam pengelolaan dan pelaksanaanya.

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan